

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2022. *Hukum Harta Kekayaan*, Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adrian Sutedi. 2012. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Boediarto. 2000. *Kompilasi Abstrak Hukum, Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Tanah*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bernard L Tanya dkk. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publising.
- Boedi Harsono. 2006. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Eddy Ruchiyat. 1999. *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*. Bandung: Alumni.
- G.H.S Lumbun Tobing. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Hans Kelsen (Alih Bahasan oleh Somardi). 2007. *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara. Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia.
- Habib Adjie. 2011. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Cetakan ketiga, Refika Aditama.

- Indroharto. 1989. *Usaha Memahami Undang Undang Tentang Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- J. Andy Hartanto. 2012. *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- K. Wantjik Saleh. 2004. *Hak Anda Atas Tanah*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Maria Farida Indrati Suprato. 2007. *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Muatan)*. Yogyakarta: Konisius.
- Munir Fuady. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Notonegoro. 2001. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- 1982. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Philippus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pegadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rachmat Setiawan. 1991. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Cet-1*. Bandung: Binacipta.
- R. Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- 1989. *Aneka Perjanjian Cet VIII*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Depok: Universitas Indonesia.
- Roscoe Pound. 1982. *Pengantar Filsafat Hukum*, diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Mohammad Radjab, Jakarta, Bhartara Karya Aksara.
- Salim HS dan Erlies SN. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke -1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- S.F. Marbun. 1997. *Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sidharta Arief. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- 1999. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat. Jakarta: Universitas Indonesia.

B. Jurnal/Tesis

- Addien Iftitah, “Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014.
- Andi Mamminanga, “Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta, 2008.
- Arizal, Ahmad, & Senjaya, O. (2021). “Tanggung Jawab PPAT Secara Pribadi Terhadap Batalnya Akta Jual Beli Akibat Adanya Perbuatan Melawan Hukum”. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 69–80. Diambil dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5536>.
- Arman Anwar, “Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan”, *SASI Volume 23 Nomor 2, Juli - Desember 2017*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura p-ISSN: 1693-0061 e-ISSN: 2614-2961.
- Boedi Harsono. “PPAT Sejarah, Tugas dan Kewenangan”. *Majalah Renvoi*, Nomor 8. 44.IV. Jakarta, 3 Januari 2007.
- I Gusti Bagus Yoga Prawira, “Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah *Responsibility of The Conveyancer Against Selling Land Deed*”, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS* Vol. IV No. 1 April 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Independensi dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Majalah Renvoi Edisi 3 Juni Tahun 2003
- Krismiatri, Rizki Fajar (2022) "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Yang Membuat Akta Jual Beli Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3537 K/

PDT/2018)," *Indonesian Notary*: Vol. 4, Article 31. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/31>.

Moh. Mahfud MD, "Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara", yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Reza Febriantina. "Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Otentik". Tesis. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Setyaningsih, Annisa (2020) "Tanggung Jawab Perdata Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pegawainya Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/PID.B/2018/PN-MTR)", *Indonesian Notary*: Vol. 2, Article 2. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/2>.

Tatiek Sri Djatmiati, "Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan dalam Tanggung Jawab atau Tanggung Gugat Negara", disampaikan pada "Lokakarya Hukum Administrasi dan Korupsi", Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.

Trisnomurti, Ria Trisnomurti dan I Gusti Bagus Suryawan, "Tugas Dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, Dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris" *Jurnal Notariil*, Vol. 2, No. 2, (November 2017).

C. Kamus

Bambang Marhijanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*. Bintang Ilmu, Surabaya, 2004.

R. Subekti dan Tirtosudibio. *Kamus Hukum*. Pradnya, Jakarta, 1980.

Saleh Adiwinata dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, 2009.

Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

-----Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

-----KUHPperdata.

-----Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

-----Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

E. Internet

HN Karima, “Perihal Tanggung Jawab Hukum Secara Perdata dan Perlindungan Konsumen Dalam Perusahaan Penerbangan”, diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/48973/4/G.BAB%20II.pdf>.

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 11:07 WIB.

[https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam hukum](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/) /Diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 09:50 WIB.

[http://birojasa-bekasi.com/2017/10/06/manfaat-pengecekan-sertifikat-merupakan perlindungan-bagi-konsumen-kreditur /](http://birojasa-bekasi.com/2017/10/06/manfaat-pengecekan-sertifikat-merupakan-perlindungan-bagi-konsumen-kreditur/) Diunduh Pada Hari Jumat Tanggal 14 Juni 2023.

Myrizal, “*Peran PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah, Dunia Hukum*”, <http://fh.unpad.ac.id>, diakses tanggal 10 September 2023.

Pieter Latumeten, “*Code of Ethics, Code of Conduct & Sense of Ethics sebagai Sistem Etika dan Pola Perilaku Notaris*” <https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/>, diunduh 24 September 2023.